



## **Serangan Israel terhadap Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara Tahun 2010**

Antonius Pramudya Adityas

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

Israel and Palestine are two countries involved in protracted and restless conflicts. In 2010, the pro-Palestinian movement named Gaza Freedom Flotilla Organization was going to send humanitarian aid to Gaza by the sea. Amid the trip, one of the ships in the Gaza humanitarian aid group Freedom Flotilla named Mavi Marmara was attacked by Israel Defense Forces. The purpose of this study is to explain the reason of Israeli attack on Mavi Marmara aid ship. The research question will be analyzed by theory of securitization to explain the reason of why Israel attacked the humanitarian aid ship Mavi Marmara. Through the securitization theory, it will be explained on how a state responds a nonpolitical issue and alters it into a political issue that requires an effective policy. This research uses explanatory method to understand the reason behind the attack on Mavi Marmara. The discussion in this study is based on Israel's point of view. The result of this research is that the attack on the Mavi Marmara aid ship was a defense strategy by the Israeli Government in order to tackle the possible threats to dismiss Israeli's Blockade to Gaza as part of its protection policy.

**Keywords:** *attack, Mavi Marmara, security, threat, securitization*

### **Pendahuluan**

Konflik Israel dan Palestina jika ditarik ke belakang bermula ketika beberapa orang bangsa Yahudi merasa tidak puas dengan kebijakan Pemerintah Eropa dan melakukan migrasi ke Palestina pada tahun 1882. Di tanah Palestina orang Yahudi tersebut membentuk organisasi Zionis<sup>1</sup>. Semakin lama, jumlah orang Yahudi dari Eropa yang melakukan migrasi ke Palestina semakin banyak. Beberapa dekade kemudian, Zionis dianggap menjadi sebuah ancaman oleh bangsa Arab yang tinggal di Palestina ([www.Mideastweb.org](http://www.Mideastweb.org), 07/08/2016).

Awal mula konflik dipicu dengan adanya Deklarasi Balfour yang disahkan pada tahun 1917. Deklarasi Balfour<sup>2</sup> disahkan oleh Lord Balfour selaku Menteri Luar Negeri Inggris yang menjanjikan bahwa wilayah Palestina merupakan *homeland* bagi orang Yahudi. Selain itu, Inggris akan memberikan bantuan secara penuh untuk mewujudkan kemerdekaan orang Yahudi di Palestina. Berawal dari deklarasi Balfour, terjadilah sebuah perpecahan yang mengakibatkan perang besar antara bangsa Yahudi melawan bangsa Arab. Keadaan semakin rumit ketika bangsa Arab sudah berhasil mengalahkan kekaisaran Turki

<sup>1</sup> Zionisme adalah sebuah gerakan nasional yang bertujuan untuk mengembalikan dan memulai kembali kedaulatan orang Yahudi ke tanah air mereka yaitu Israel ([www.merriam-webster.com](http://www.merriam-webster.com), 18/05/2016).

<sup>2</sup> Deklarasi Balfour adalah bentuk dukungan yang diberikan pada tanggal 2 November 1917 oleh Arthur James Balfour selaku Menteri Luar Negeri Inggris melalui Lord Roschild selaku Pemimpin komunitas Yahudi di Inggris yang menyatakan bahwa pemerintah Inggris mendukung upaya Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina (John, 1988).

Ottoman, tetapi Inggris tidak menepati janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada Arab. Inggris justru mendukung kemerdekaan bangsa Yahudi di atas tanah Palestina. ([www.Israel-palestina.info](http://www.Israel-palestina.info), 18/05/2016).

Kemerdekaan Israel dideklarasikan oleh David Ben-Gurion pada tanggal 14 Mei 1948. Peristiwa kemerdekaan Israel tidak memicu berhentinya perang dengan bangsa Arab. Peperangan Israel dan bangsa Arab terjadi sangat lama, hingga munculah gerakan PLO (*Palestine Liberation Organization*) pada tahun 1967. PLO berhasil memperjuangkan bangsa Palestina untuk dapat mempunyai pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Otoritas Palestina pada tahun 1995. Sejak awal konflik, Israel dan Palestina sudah berusaha untuk melakukan perdamaian tetapi selalu gagal. Terkait kepemimpinan PLO di otoritas Palestina, pihaknya lebih mengutamakan jalur diplomasi terhadap Pemerintah Israel. Meskipun di sisi lain PLO juga pernah menembakkan roket ke Israel. Berbeda dengan pesaing PLO yaitu Hamas yang bersifat sangat radikal dan ekstrem. Hamas berdiri pada tahun 1987 dan telah menyerang Israel mulai tahun 1993 melalui sayap militernya yaitu Izzuddin al-Qassam. Hamas menilai bahwa Fatah merupakan organisasi yang lemah serta tunduk terhadap Israel. Pada tahun 2006, Hamas berupaya mencalonkan anggotanya untuk menjadi kandidat di dalam pemerintahan Otoritas Palestina (Pressman, 2005, hal. 1-15).

Hamas memenangkan pemilu legislatif dan memimpin Otoritas Palestina mulai 25 Januari 2006. Hamas menjadi sangat agresif dan berhasil mengalahkan Fatah di Jalur Gaza. Hamas mempunyai cita-cita untuk menghancurkan negara Israel. Kecemasan Israel atas invasi yang dilakukan oleh Hamas menggunakan roket berkali-kali menjadi dasar upaya untuk memperketat segala sektor pertahanan dan keamanannya ([www.Artileri.org](http://www.Artileri.org), 16/08/2016). Penggunaan roket oleh Hamas memberikan banyak dampak buruk terhadap rakyat dan Pemerintah Israel. Banyak sekali jenis roket yang digunakan oleh Palestina untuk menyerang Israel dan yang paling terkenal adalah roket Al-Qassam<sup>3</sup>. Serangan roket yang dilancarkan oleh Hamas dari Jalur Gaza ke Israel, menyebabkan Israel berupaya memperketat blokadanya baik udara, darat dan laut. Pada tahun 2008 merupakan serangan roket terbanyak yang dilakukan oleh Hamas, kelompok tersebut meluncurkan 3.278 roket ke wilayah Israel. Serangan tersebut menewaskan sepuluh pasukan IDF dan tiga warga sipil. Mulai tanggal 17 Juni 2008 hingga 18 Januari 2009 Israel melancarkan serangan balasan yang dinamai *Operation Cast Lead* yang menewaskan 1.434 rakyat Palestina. Serta mengakibatkan tujuh ribu lebih rakyat Palestina terluka dan empat ribu rumah hancur (Palestinian Centre for Human Rights, 2009).

Sumber persenjataan dan roket yang dimiliki oleh Hamas sebagian besar merupakan barang selundupan. Terkait dengan penyelundupan yang terjadi, pemasok utama senjata roket tersebut adalah negara-negara di sekitar Palestina dan Israel. Rute penyelundupan utama adalah dari Iran dikirim ke Sudan, Mesir dan Semenanjung Sinai, dari situ roket masuk ke Jalur Gaza. Kegiatan penyelundupan melibatkan langsung Iran dalam proses pengirimannya ke Jalur Gaza. Pada tahun 2010 ratusan roket, mortir, anti tank, dan bahan baku peledak telah diselundupkan ke Jalur Gaza. Maka dari itu kelompok Hamas menerima pasokan kebutuhan militer tersebut untuk dapat menyerang dan mengimbangi kekuatan Israel ([www.Shabak.gov.il.com](http://www.Shabak.gov.il.com), 25/08/2016). Perang di Jalur Gaza telah mengakibatkan situasi yang tidak kondusif, hal tersebut menyebabkan munculnya simpati dari masyarakat internasional. Banyak bantuan kemanusiaan yang disampaikan dengan berbagai macam cara oleh negara-negara didunia, khususnya negara pro Palestina.

---

<sup>3</sup> Roket Qassam adalah roket rakitan berisi bahan peledak yang dibuat oleh kelompok Hamas di Palestina. Nama "Qassam" diambil dari tokoh Islam Palestina di awal abad ke-20 Syekh Izzuddin al-Qassam. Qassam merupakan roket artileri yang tidak memiliki sistem pemandu, dan pertama kali digunakan pada Oktober 2001 terhadap pemukiman Yahudi di Gush Katif, Jalur Gaza ([www.Voa-islam.com](http://www.Voa-islam.com), 16/08/2016).

Organisasi Free Gaza Movement telah melakukan lima kali pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dan gagal, karena ditangkal oleh Israel dengan alasan penegakan blokade. Namun, Free Gaza Movement tidak pernah menyerah dan tetap melanjutkan aksi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza (Free Gaza Movement, 2016).

Pada tanggal 31 Mei 2010, terbentuklah sebuah gerakan kemanusiaan kemitraan yang bernama Gaza Freedom Flotilla yang juga diinisiasi oleh Free Gaza Movement. Gerakan Gaza Freedom Flotilla mempunyai tujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza Palestina dengan menerobos blokade yang telah diperketat Israel sejak tahun 2007. Misi kemanusiaan berupa pengiriman bantuan material kebutuhan sehari-hari penduduk Gaza yang dilakukan melalui jalur laut menggunakan kapal, karena jalur lain dinilai tidak mungkin. Gaza hanya mempunyai tiga jalur darat yang berada di tiga pos perbatasan Israel dan salah satunya adalah jalur menuju Rafah di Mesir. Jalur laut adalah pilihan yang tepat untuk memasuki wilayah Gaza. Otoritas Palestina mempunyai kontrol sejauh dua puluh mill laut dari garis pantai, wilayah tersebut juga berada di bawah pengawasan Israel. Berdasar hal tersebut, maka penerobosan blokade adalah cara yang ilegal dipilih Gaza Freedom Flotilla untuk mengirimkan secara langsung bantuan kemanusiaan ke Gaza. (Buchan, 2011).

Gaza Freedom Flotilla mengirim bantuan kemanusiaan melalui jalur laut menggunakan tiga kapal penumpang dan enam kapal barang digunakan. Dari tiga kapal penumpang, salah satunya bernama Mavi Marmara yang diisi penuh dengan sekitar 700 aktivis kemanusiaan pro kemanusiaan Jalur Gaza yang berasal dari 37 negara. Sebelumnya Perdana Menteri Israel telah memperingatkan Pemerintah Turki untuk mencegah rombongan tersebut menuju Gaza karena adanya blokade. Namun peringatan tersebut diabaikan oleh Turki dan Gaza Freedom Flotilla tetap melakukan perjalanannya. Ketika rombongan Gaza Freedom Flotilla berlayar di laut internasional sejauh 73 mil dari garis pantai menuju Gaza, pasukan Israel memberikan serangan terhadap kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara ([www.Telegraph.co.uk](http://www.Telegraph.co.uk), 16/06/2016). Masyarakat internasional mengecam tindakan Israel dengan berpandangan bahwa Israel semata-mata melakukan serangan terhadap kapal Mavi Marmara tanpa dasar, serta bertujuan hanya untuk melukai aktivis kemanusiaan di dalamnya. Pemerintah Israel melalui Perdana Menteri Benjamin Netanyahu membenarkan aksi pasukan IDF dalam rangka penegakan keamanan negara. Di sisi lain, hingga saat ini Israel tidak diberikan sanksi oleh PBB atas tindakannya yang menurut masyarakat simpatisan Palestina terjadi penyalahgunaan blokade Gaza. Kesalahan Israel tidak terbukti hingga pada saat ini, sehingga secara tidak langsung telah adanya pembenaran terhadap upaya pertahanan untuk keamanan wilayahnya ([www.Bbc.com](http://www.Bbc.com), 25/08/2016).

Fenomena serangan Israel terhadap kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara pada tahun 2010 dijadikan sebagai dasar penelitian di dalam ranah akademis. Beberapa penelitian terdahulu selalu membahas mengenai tanggapan negara-negara di dunia atas serangan Israel terhadap kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara. Pertama, A. Juliastri dari Universitas Hasanuddin melakukan penelitian dengan judul “Sikap Masyarakat Internasional Terhadap Pembajakan Mavi Marmara”. Kedua, Anis Suci Fajarwati dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan penelitian dengan judul “Citra Israel di Dunia Internasional Pasca Serangan Terhadap Kapal Mavi Marmara”. Ketiga, Pietro Azzali dari Arctic University of Norway melakukan penelitian dengan judul “The Naval Blockade of the Gaza Strip: A Law of the Sea Perspective”. Dimitrios Meritis dari Lund University melakukan penelitian dengan judul “Nonstate Actor Incidents and Their Effect on Bilateral Relations”. Fokus dari penelitian-penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai ranah politik internasional, berangkat dari pandangan buruk terhadap Israel

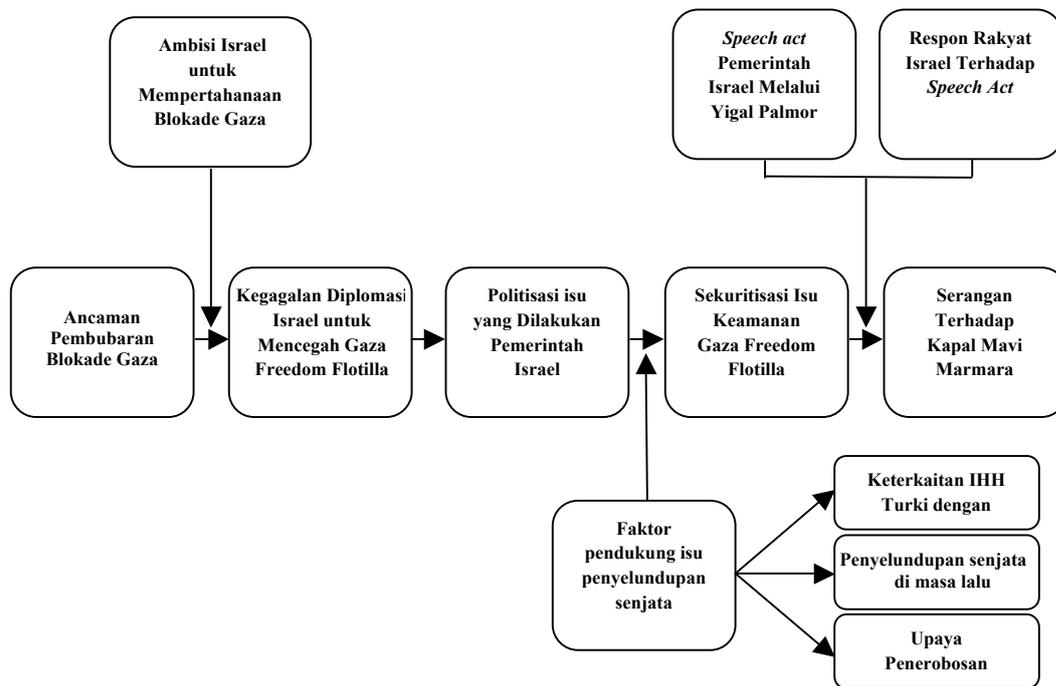
akibat pelanggaran penggunaan blokade yang dilihat dari sudut pandang pro-Palestina. Penelitian sebelumnya hanya melihat kasus ini dari satu sudut pandang yaitu pro-Palestina dan belum ada yang memakai sudut pandang Israel untuk menjelaskan peristiwa ini. Penelitian baru seharusnya dibuat untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan menjelaskan peristiwa serangan terhadap Mavi Marmara dari sudut pandang Israel. Peristiwa serangan Israel terhadap kapal Mavi Marmara terjadi karena pasti adanya sebab dan tujuannya. Negara dalam setiap perilakunya mempunyai tujuan untuk mencapai sebuah kepentingan nasional, terutama terkait upaya penegakan keamanan dalam menghadapi sebuah ancaman ([www.Palestinecampaign.org](http://www.Palestinecampaign.org), 16/06/2016).

Penelitian ini mempunyai keunikan yaitu menjelaskan peristiwa serangan Israel terhadap Kapal Mavi Marmara dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang Israel. Ketiadaan sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada Israel hingga saat ini berdasarkan penyalahgunaan blokade yang dipandang buruk oleh simpatisan pro-Palestina menjadi sebuah fakta yang menarik. Penelitian ini mengkaji penyebab serangan yang dilakukan oleh Israel, serta memberikan pandangan baru yang lebih luas untuk kasus ini dalam konteks studi keamanan. Fokus dalam penelitian ini membahas tentang perang strategi antara Pemerintah Israel dengan Gerakan Gaza Freedom Flotilla. Gerakan Gaza Flotilla menggunakan modus bantuan kemanusiaan untuk melakukan pembubaran blokade Gaza yang penting keberadaannya bagi keamanan nasional Israel. Di sisi lain Pemerintah Israel harus menangkal ancaman berupa pembubaran blokade tersebut dengan strategi keamanannya yang didasarkan kepada upaya sekuritisasi. Pemerintah Israel melakukan sekuritisasi supaya terbentuk pemikiran bahwa Gerakan Gaza Freedom Flotilla mengangkut senjata berbahaya yang akan dikirimkan kepada Hamas di Jalur Gaza. Upaya sekuritisasi isu tersebut dapat menjadi dasar Pemerintah Israel untuk melakukan penangkalan terhadap Gerakan Gaza Freedom Flotilla atas dasar prinsip pencegahan senjata. Strategi keamanan ini bertujuan untuk menghindarkan Israel dari provokasi yang diagendakan Gaza Freedom Flotilla, sehingga Israel dapat menangkal ancaman pembubaran blokade Gaza dan terbebas dari sanksi internasional ([www.Timesofisrael.com](http://www.Timesofisrael.com), 16/06/2016).

Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi dari Barry Buzan. Dalam teori ini dijelaskan bahwa sebuah isu non politis dapat disekuritisasi menjadi isu keamanan penting yang harus segera mendapatkan penanganan. Teori sekuritisasi mempunyai lima konsep penting yaitu *existential threat*, *referent object*, *securitizing actor*, *speech act* dan *audience*. Pertama, *existential threat* merupakan ancaman nyata yang dianggap membahayakan suatu pihak tertentu. Kedua, *referent object* merupakan objek yang dilindungi dari adanya sebuah ancaman nyata yang berdampak merugikan terhadapnya. Ketiga, *securitizing actor* merupakan aktor yang melakukan upaya sekuritisasi untuk merubah sebuah isu nonpolitik menjadi isu keamanan penting. Keempat, *speech act* merupakan bentuk pernyataan secara verbal yang diutarakan oleh aktor sekuritisasi untuk meyakinkan objek yang akan dipengaruhi. Kelima, *audience* merupakan objek sasaran yang akan dipengaruhi dengan adanya upaya sekuritisasi (Buzan, Wæver, & Wilde, 1998, hal. 36). Proses pembentukan sekuritisasi dibagi menjadi tiga langkah. Langkah pertama, aktor sekuritisasi mewacanakan sebuah isu. Langkah kedua, mencari korelasi mengenai isu yang diwacanakan, aktor yang terlibat, faktor-faktor pendukung sekuritisasi, dan interaksinya. Langkah ketiga, menyimpulkan korelasi antara keempat hal tersebut sebagai data untuk melihat kaitannya dalam masalah keamanan (Buzan & Wæver, 2009, hal. 256–258).

## Pembahasan

### Proses Sekuritisasi Kapal Bantuan Kemanusiaan Mavi Marmara 2010



Proses sekuritisasi terhadap kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara dijelaskan melalui lima tahap. **Tahap pertama, ancaman pembubaran blokade Gaza.** Pandangan Pemerintah Israel terhadap isu kemanusiaan (nonpolitis) berubah setelah mengetahui bahwa Organisasi Free Gaza Movement bekerjasama dengan IHH Turki pada 30 Januari 2010 dan berencana mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Perubahan pandangan Pemerintah Israel disebabkan karena IHH Turki diketahui tergabung dalam jaringan teroris internasional (www.Theguardian.com, 10/09/2016). Para aktivis kemanusiaan pro Palestina yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut menyatakan bahwa rombongan Gaza Freedom Flotilla akan mengirimkan bantuan kemanusiaan sendiri hingga ke Jalur Gaza. Pengiriman bantuan kemanusiaan oleh Gaza Freedom Flotilla mempunyai tujuan utama yaitu untuk membubarkan blokade Gaza. Upaya pembubaran blokade yang direncanakan oleh Gaza Freedom Flotilla menjadi sebuah *existential threat* yang mengancam keamanan nasional Israel. *Referent object* sebagai objek yang dilindungi dari ancaman tersebut adalah keamanan nasional Israel (www.Aljazeera.com, 10/09/2016).

Israel berambisi untuk menangkal *existential threat* dengan cara mempertahankan blokade Gaza. Pada dasarnya tujuan utama dari blokade Gaza adalah untuk mencegah peralatan berbahaya masuk ke Gaza. Peralatan yang dimaksudkan adalah senjata militer, roket, uang tunai, dan peralatan lain yang dapat digunakan untuk memfasilitasi serangan Hamas terhadap Israel. Di sisi lain, Israel mempunyai tujuan yang lebih penting yaitu melengserkan Pemerintahan Hamas di Gaza, karena Israel lebih setuju jika Fatah menjadi pemimpin di Gaza. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah Israel meraih kepentingannya di Gaza. Diperketatnya blokade Gaza mulai tahun 2007 mempunyai peran yang sangat penting bagi Pemerintah Israel yaitu untuk mengoptimalkan kontrol terhadap wilayah Gaza. Israel memanfaatkan keberadaan blokade tersebut untuk menekan keberadaan gerakan radikal Hamas yang berada di Gaza. Penegakan blokade yang keras dalam menangkal bantuan kemanusiaan akan menyebabkan rakyat Gaza semakin

menderita, sehingga pada akhirnya mereka mau melakukan pemberontakan terhadap Hamas. Strategi tersebut menjadi dasar Israel secara perlahan melengserkan Hamas dari Jalur Gaza ([www.Lipi.go.id](http://www.Lipi.go.id), 09/09/2016).

**Tahap kedua, kegagalan diplomasi Israel untuk mencegah kedatangan Gaza Freedom Flotilla.** Pemerintah Israel berusaha untuk memperingatkan seluruh pihak terkait supaya bantuan kemanusiaan tersebut disalurkan secara resmi melalui Israel atau perwakilan PBB untuk Palestina. Israel mulai melakukan kontak dengan Turki jauh sebelum peristiwa Mavi Marmara terjadi, yaitu pada tanggal 14 Mei 2010. Inisiatif tersebut diawali oleh Benjamin Netanyahu yang menghubungi pejabat tinggi Turki yaitu Recep Tayyip Erdoğan. Kontak selanjutnya dilakukan oleh Menteri Pertahanan Israel terhadap Menteri Luar Negeri Turki yang keduanya telah menjalin hubungan selama bertahun-tahun lamanya. Tujuan Pemerintah Israel melakukan kontak dengan pemerintah Turki adalah untuk mencegah adanya konflik antara pasukan keamanan Israel dan aktivis kemanusiaan dalam armada Gaza Freedom Flotilla di laut lepas. Kontak juga dilakukan terhadap PBB dan beberapa negara partisipan, untuk mencegah warga negaranya ikut serta dalam gerakan Freedom Gaza Flotilla yaitu seperti Mesir, Yunani, Siprus, Irlandia, Inggris, dan Turki. ([www.Worldjewishcongress.org](http://www.Worldjewishcongress.org), 20/09/2016).

Upaya pencegahan seharusnya dapat dilakukan Turki sebagai negara asal penyelenggara dari Gaza Freedom Flotilla. Turki berhak untuk secara tegas memberikan pengertian dan membatalkan rombongan Gaza Freedom Flotilla yang akan menuju Gaza. Jalur diplomasi dilakukan terus-menerus oleh Israel hingga kedatangan rombongan Gaza Freedom Flotilla di lepas Pantai Gaza. Secara pribadi Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel juga menghubungi Perdana Menteri Mesir yaitu Ahmed Nazif pada 27 Mei 2010 untuk membantu Pemerintah Israel membujuk Pemerintah Turki agar membatalkan rombongan kapal bantuan kemanusiaan Gaza Freedom Flotilla menuju Gaza. Seluruh upaya diplomasi yang dilakukan oleh Israel gagal akibat tidak mendapatkan respon positif dari pihak yang bersangkutan ([www.Jewishjournal.com](http://www.Jewishjournal.com), 20/09/2016).

**Tahap ketiga, politisasi isu yang dilakukan Pemerintah Israel.** Pemerintah Israel dalam penelitian ini menjadi *securitizing actor* yang berfungsi melaksanakan sekuritisasi dengan mengubah isu kemanusiaan oleh Gaza Freedom Flotilla menjadi isu keamanan penting. Sejalan dengan strategi Gaza Freedom Flotilla yang mengirimkan bantuan kemanusiaan dengan motif provokasi dan bertujuan membubarkan blokade Gaza, menyebabkan Pemerintah Israel harus menyusun strategi cerdas untuk menghadapi ancaman tersebut. Di satu sisi Pemerintah Israel sadar bahwa pihaknya tidak diperbolehkan untuk menyerang tanpa dasar, di sisi lain Israel mempunyai tujuan utama untuk mempertahankan blokade Gaza yang penting baginya. Berkaitan dengan penangkalan ancaman terhadap kedatangan Gaza Freedom Flotilla, Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri telah merencanakan strategi yang harus dilakukan Pemerintah Israel. Netanyahu menyatakan bahwa:

*In the discussion held by “the Seven”, I said that the principle that should guide us is “the prevention of weapons smuggling.” I also said that this was the only explanation that will be understood by the international community and that the right policy would be one in which Israel would “screen and inspect” goods to prevent the entry of weapons into the Gaza Strip”* ([www.Pmo.gov.il](http://www.Pmo.gov.il), 20/09/2016).

Netanyahu bersama seluruh Pemerintah Israel di dalam rapat internal The Seven telah sepakat bahwa strategi mempertahankan blokade secara legal dapat didasarkan kepada prinsip pencegahan penyelundupan senjata. Prinsip tersebut merupakan satu-satunya

alasan yang dapat dimengerti oleh rakyat Israel dan masyarakat internasional. Di satu sisi Pemerintah Israel dapat melindungi keamanan nasionalnya dari ancaman pembubaran blokade Gaza. Di sisi lain Pemerintah Israel dapat terbebas dari hukuman dan kecaman internasional atas penindakan terhadap rombongan Gaza Freedom Flotilla (www.Pmo.gov.il, 20/09/2016).

Pelaksanaan tindakan politisasi isu dimaksudkan untuk memberikan pengertian terhadap masyarakat, supaya masyarakat mempunyai pandangan yang selaras dengan Pemerintah Israel. Sehingga masyarakat Israel juga menganggap bahwa kedatangan rombongan Gaza Freedom Flotilla dapat menjadi sebuah ancaman membahayakan keamanan nasionalnya. Politisasi isu didasarkan kepada tiga hal penting pendukung isu penyelundupan senjata. **Pertama**, adanya hubungan IHH Turki dengan gerakan radikal di Gaza yaitu Hamas. IHH Turki memberikan bantuan finansial dan material untuk mendukung keberadaan Hamas di jalur Gaza. **Kedua**, keberhasilan Israel menangkap dua aksi penyelundupan senjata di masa lalu yaitu Kapal MV Karine A pada tahun 2002 dan Kapal MV Francop pada tahun 2009. **Ketiga**, upaya penerobosan blokade yang diserukan oleh aktivis kemanusiaan yaitu Fintan Lane, Gretta Berlin, dan Bullent Yildirim. Sejalan dengan hal tersebut, isu kemanusiaan (nonpolitis) kedatangan rombongan Gaza Freedom Flotilla akan segera berubah menjadi sebuah isu keamanan penting yang diyakini oleh masyarakat luas terutama rakyat Israel. Sehingga isu keamanan tersebut membutuhkan tindakan penanganan yang segera terkait penyelesaiannya (The Turkel Commission, 2010).

*Speech act actor* dalam isu Gaza Flotilla adalah Yigal Palmor selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel. Selain menjadi juru bicara, Yigal Palmor adalah Direktur Hubungan Masyarakat dan Badan Komunikasi Yahudi untuk Israel. *Speech act* dilaksanakan melalui pidatonya yang diunggah dalam website resmi Pemerintah Israel pada tanggal 24 Mei 2010. Pemerintah Israel selaku aktor sekuritisasi menyampaikan pendapatnya melalui Yigal Palmor. Terkait pidatonya, Yigal Palmor memberikan pengertian terhadap masyarakat luas terutama rakyat Israel mengenai isu kedatangan Gaza Freedom Flotilla yang akan berlayar menuju Gaza pada tanggal 31 Mei 2010. *Speech act* yang diberikan Yigal Palmor bertujuan untuk menguatkan rencana yang disusun Benjamin Netanyahu. Yigal Palmor memproyeksikan bahwa Gaza Freedom Flotilla merupakan organisasi pengirim bantuan kemanusiaan palsu serta mempunyai agenda berbahaya yaitu untuk membubarkan blokade Gaza dan melakukan penyelundupan senjata yang ditujukan kepada Hamas di Jalur Gaza (www.Mfa.gov.il, 18/10/2016).

Respon rakyat Israel sebagai *audience* terhadap *speech act* yang diberikan oleh pemerintahnya merupakan tolok ukur keberhasilan upaya sekuritisasi. Sesuai dengan *speech act* Pemerintah Israel melalui Yigal Palmor, rakyat Israel meyakini bahwa Gaza Freedom Flotilla adalah sebuah gerakan kemanusiaan palsu yang bertujuan menerobos blokade Gaza dan mengirimkan senjata militer serta roket kepada Hamas. Rakyat Israel telah menerima *speech act* yang diberikan oleh Pemerintah Israel. Respon tersebut berupa tanggapan terhadap isu kedatangan Gaza Freedom Flotilla yang membawa ancaman. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya aksi protes dari rakyat Israel. Salah satunya adalah Israeli Yatch Club yang melakukan aksi protes terhadap rombongan bantuan kemanusiaan yang akan datang pada tanggal 31 Mei 2010. Kelompok tersebut menyatakan bahwa anti terhadap gerakan Gaza Freedom Flotilla, serta menolak adanya bantuan kemanusiaan Gaza Freedom Flotilla menuju Gaza. Israeli Yatch Club hingga melakukan kampanye di Laut Herzliya dengan memasang spanduk di atas kapalnya sebagai bentuk aksi penolakan kedatangan Gaza Freedom Flotilla (www.Notmytribe.com, 20/10/2016).

**Tahap keempat, sekuritisasi isu keamanan Gaza Freedom Flotilla.** Kesesuaian antara *speech act* dan respon yang ditunjukkan rakyat Israel merupakan salah satu bentuk

keberhasilan Pemerintah Israel dalam melakukan *securitizing move*. Rakyat Israel telah mempunyai kesepahaman dengan pemerintahnya yang memproyeksikan bahwa gerakan Gaza Freedom Flotilla merupakan ancaman nyata yang dapat membahayakan keamanan negara Israel. Respon rakyat Israel atas penolakan kedatangan rombongan Gaza Freedom Flotilla untuk mencapai Gaza, merupakan tanda bahwa isu tersebut telah bergeser menjadi sebuah isu keamanan penting. Pergeseran isu tersebut dijadikan dasar oleh Pemerintah Israel dalam melakukan tindakan dengan segera. Tindakan tersebut merupakan bentuk upaya Pemerintah Israel dalam menghilangkan sebuah ancaman yang dapat membahayakan keamanan nasionalnya (UN Secretary General's, 2011).

Rencana pencegahan terhadap gerakan Gaza Freedom Flotilla disosialisasikan oleh Pemerintah Israel melalui program televisi lokal yaitu TV2 Israel. Tayangan tersebut memberitakan bahwa pemerintah dan pasukan militer Israel akan menangkal rombongan bantuan kemanusiaan menembus blokade Gaza yang akan diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2010. Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel, memutuskan untuk menangkal kapal rombongan Gaza Freedom Flotilla untuk mencapai Gaza. Kebijakan tersebut diteruskan kepada Menteri Pertahanan Israel pada saat itu yaitu Ehud Barak. Ehud Barak memberikan perintah langsung terhadap Eliezer Marom selaku Komandan IDF untuk melakukan penindakan terhadap kapal-kapal dalam rombongan Gaza Freedom Flotilla. Penindakan terhadap rombongan Gaza Freedom Flotilla telah direncanakan oleh Ehud Barak bersama dengan Eliezer Marom yang diberi nama *Winds of Heaven Operation*. Menyambut kedatangan rombongan Gaza Freedom Flotilla, Eliezer Marom menjelaskan isi dari *Winds of Heaven Operation* tersebut kepada pasukan IDF. Penjelasan tersebut bertujuan untuk memberikan pengarahan terkait strategi militer untuk menangkal rombongan Gaza Freedom Flotilla (Turkish National Commission Of Inquiry, 2011)

**Tahap kelima, serangan pasukan IDF Terhadap Kapal Mavi Marmara.** Pelaksanaan prosedur dapat dilakukan dengan mengarahkan kapal menuju Pelabuhan Ashdod untuk melakukan pemeriksaan serta memastikan kapal bantuan kemanusiaan bebas dari senjata dan sarana pendukung kegiatan militer. Setelah pemeriksaan, material bantuan kemanusiaan akan disampaikan langsung oleh pihak Israel melalui jalur darat dan dikawal oleh pihak ketiga yaitu PBB. Secara tegas kapten kapal Mavi Marmara menolak prosedur pemeriksaan dan tetap melanjutkan perjalanan menuju ke pelabuhan Gaza. Penolakan dilakukan oleh Kapten Kapal dan aktivis kemanusiaan dengan menjawab "*Shut up, go back to Auschwitz*" and "*We're helping Arabs go against the US, don't forget 9/11*". Pernyataan rasis tersebut berhasil direkam dan disimpan oleh Pasukan IDF (www.jerusalempost.com, 09/10/2016).

Beberapa jam kemudian Israel melakukan serangan peringatan melalui perahu Zodiak yang telah mengepung Kapal Mavi Marmara. Serangan peringatan Israel dilakukan dengan menembakkan peluru karet dengan senjata *pintball*, granat asap, granat kejut dan gas air mata ke arah para aktivis di Kapal Mavi Marmara. Serangan peringatan tidak membuat awak kapal dan para aktivis menghentikan laju kapal, tetapi mereka justru memberikan perlawanan berupa kekerasan menggunakan alat-alat yang telah disiapkan. Pasukan Israel secara tegas mendatangnya dengan helikopter dan menurunkan pasukan IDF ke geladak Kapal Mavi Marmara menggunakan tali. Para aktivis menyambutnya dengan perlawanan menggunakan pisau, ketapel, batu, bom molotov, batang logam tajam, tongkat, dan palu. Keadaan tersebut sempat mengakibatkan beberapa pasukan IDF mengalami koma. Kegagalan serangan peringatan yang diberikan, menyebabkan Israel harus melakukan tindakan tegas (Turkish National Commission Of Inquiry, 2011).

Tindakan tegas Pasukan IDF bukan hanya bertujuan untuk menghalau Kapal Mavi Marmara supaya menjauh dari perairan Gaza, tetapi juga merupakan tindakan pertahanan atas keselamatan dirinya. Pasukan IDF menggunakan senjata api untuk melumpuhkan para

aktivis kemanusiaan yang melakukan perlawanan. Pasukan Israel melakukan penembakan terhadap aktivis kemanusiaan dan berhasil membuat mereka menyerah. Setelah itu, Kapal Mavi Marmara dapat dikuasai sepenuhnya oleh Pasukan IDF dan dibawa ke Ashdod serta diikuti lima kapal lainnya dalam rombongan Gaza Freedom Flotilla. Peristiwa konfrontasi di atas kapal Mavi Marmara ini menimbulkan sembilan korban meninggal dari pihak aktivis dan dua korban luka berat dari pihak tentara IDF Israel. Pihak Israel berhasil menangkal ancaman terhadap rakyatnya dengan melakukan serangan, sebagai bentuk penegakan keamanan (Human Rights Council, 2010).

## **Kesimpulan**

Keputusan Pemerintah Israel untuk melakukan serangan terhadap kapal bantuan kemanusiaan Mavi Marmara dalam rombongan Gaza Freedom Flotilla merupakan wujud penangkalan terhadap ancaman nyata berupa pembubaran blokade Gaza. Penangkalan pembubaran blokade didasarkan kepada tindakan sekuritisasi sebagai strategi keamanan Pemerintah Israel. Berdasarkan implementasinya, Pemerintah Israel melakukan politisasi terhadap ancaman pembubaran blokade Gaza menjadi ancaman penyelundupan senjata yang ditujukan kepada Hamas di Gaza. Politisasi isu tersebut bertujuan untuk menghindarkan Israel terjerumus dalam provokasi tindak penyerangan terhadap kapal bantuan kemanusiaan dalam rombongan Gaza Freedom Flotilla. Pemerintah Israel meyakini bahwa prinsip pencegahan penyelundupan senjata merupakan alasan yang dapat diterima rakyat Israel dan masyarakat internasional. Keberhasilan sekuritisasi akan memudahkan Pemerintah Israel dalam melakukan penindakan terhadap rombongan Gaza Freedom Flotilla dan terbebas dari sanksi internasional.

Strategi sekuritisasi Pemerintah Israel terkait prinsip pemeriksaan senjata di dalam rombongan Gaza Freedom Flotilla harus dipertegas dengan faktor-faktor yang mendukung. Dalam penelitian ini terdapat tiga faktor yang mendasari adanya kegiatan penyelundupan senjata yaitu keterkaitan antara Organisasi IHH Turki dengan kelompok radikal Hamas di Palestina, tertangkapnya dua aksi penyelundupan senjata di masa lalu, dan adanya upaya penerobosan blokade oleh Gerakan Gaza Freedom Flotilla. Ketiga faktor tersebut dijadikan dasar nilai Pemerintah Israel untuk melakukan *securitizing move*. Ketiga faktor tersebut harus dihubungkan dengan lima konsep penting sekuritisasi agar hasil penelitian tidak menjadi kabur.

Sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Israel didasarkan kepada lima konsep pentingnya. Pertama, *Existential threat* dalam studi kasus ini adalah ancaman pembubaran blokade oleh Gaza Freedom Flotilla. Kedua, *referent object* dalam studi kasus ini adalah negara Israel. Ketiga, *securitization actor* dalam studi kasus ini adalah Pemerintah Israel. Keempat, *Speech act* dalam studi kasus ini dilakukan oleh Yigal Palmor. Kelima *Audience* dalam studi kasus ini adalah rakyat Israel. Analisis hubungan antara tiga faktor pendukung dan lima konsep sekuritisasi menjadi dasar untuk melakukan serangan terhadap kapal Mavi Marmara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh upaya sekuritisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Israel terhadap gerakan Gaza Freedom Flotilla dinyatakan berhasil. Keberhasilan sekuritisasi ditunjukkan dengan *speech act* Pemerintah Israel yang telah diterima dan direspon oleh rakyatnya. Respon tersebut dijadikan dasar untuk Pemerintah Israel melakukan penindakan terhadap gerakan Gaza Freedom Flotilla yang mengganggu keamanan negara. Didukung dengan hasil survei yang juga menyatakan bahwa rakyat Israel setuju terhadap serangan yang dilakukan IDF terhadap Mavi Marmara sebagai upaya penegakan keamanan. Upaya politisasi isu pencegahan penyelundupan senjata juga berhasil dilaksanakan Pemerintah Israel untuk mempertahankan blokade Gaza dari provokasi gerakan Gaza Freedom Flotilla.

## Referensi:

- Aljazeera. (2010). *Tensions rise over Gaza aid fleet*. Dalam <http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2010/05/2010528431964325.html>. Diakses 10 September 2016.
- Artileri. (2012). *Iron Dome Israel Vs Roket Al-Qassam Palestina*. Dalam <http://www.artileri.org/2012/11/iron-dome-israel-vs-roket-al-qassam-palestina.html>. Diakses 16 September 2016.
- Basyar, H. (2010). *Mavi Marmara, Mengapa Kamu Diserang*. Dalam <http://lipi.go.id/berita/single/mavi-marmara-mengapa-kamu-diserang--/5094>. Diakses 09 September 2016.
- BBC. (2014). *Gaza flotilla raid: No Israel charges over Mavi Marmara*. Dalam <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29934002>. Diakses 25 Agustus 2016.
- Buzan, B., Wæver, O., & Wilde, J. d. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. Colorado: Lynne Rienner Publishers, pp 1-41.
- Free Gaza Movement. (2016). *Free Gaza Movement*. Dalam <http://www.freegaza.org/>. Diakses 23 Agustus dan 10 September 2016.
- Human Rights Council. (2010). *Report of the International Fact-finding Mission to Investigate Violations of International Law, Including International Humanitarian and Human Rights Law, Resulting from the Israeli Attacks on the Flotilla of Ships Carrying Humanitarian Assistance*. Geneva: United Nation.
- Israel Ministry of Foreign Affairs. (2010). *MFA Spokesman on Gaza Flotilla*. Dalam [http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/humanitarian/pages/mfa\\_spokesman\\_gaza\\_flotilla\\_24-may-2010.aspx](http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/humanitarian/pages/mfa_spokesman_gaza_flotilla_24-may-2010.aspx). Diakses 18 Oktober 2016.
- Israel Prime Minister's Office. (2010). *PM Netanyahu's Statement Before the Turkel Commission*. Dalam <http://www.pmo.gov.il/English/MediaCenter/Events/Pages/eventturkel090810.aspx>. Diakses 20 September 2016.
- Israel Security Agency. (2013). *Smuggling Weapons from Iran into the Gaza Strip through Sudan and Sinai*. Dalam <https://www.shabak.gov.il/English/EnTerrorData/Reviews/Pages/SmugglingWeapon.aspx>. Diakses 25 Agustus 2016.
- Israel-Palestina informatie. (2008). *The Arab-Israeli Conflict*. Dalam [http://www.israel-palestina.info/arab-israeli\\_conflict.html/#The\\_Six\\_Day\\_War\\_and\\_Arab\\_rejectionism](http://www.israel-palestina.info/arab-israeli_conflict.html/#The_Six_Day_War_and_Arab_rejectionism). Diakses 18 Mei 2016.
- Jewish Journal. (2010). *Netanyahu Questioned by Flotilla Investigators*. Dalam [http://www.jewishjournal.com/flotilla\\_crisis/article/netanyahu\\_questioned\\_by\\_flotilla\\_investigators\\_20100809](http://www.jewishjournal.com/flotilla_crisis/article/netanyahu_questioned_by_flotilla_investigators_20100809). Diakses 20 September 2016.
- Lappin, Y. (2011). *Gaza flotilla: Go back to Auschwitz*. Dalam <http://www.jpost.com/Middle-East/Gaza-flotilla-Go-back-to-Auschwitz>. Diakses 09 September 2016.
- Mideastweb. (2007). *The history of Zionism and the creation of Israel*. Dalam <http://www.Mideastweb.org/zionism.html>. Diakses 07 Agustus 2016.
- Palestine Solidarity Campaign. (2013). *Israel apologises for Mavi Marmara killings – PSC's response*. Dalam <https://www.palestinecampaign.org/israel-apologises-for-mavi-marmara-killings-pscs-response/>. Diakses 16 Juni 2016.
- Palestinian Centre for Human Rights (2009). *The Dead in the course of the Israeli recent military offensive on the Gaza strip between 27 December 2008 and 18 January 2009*. Palestine. Palestinian Centre for Human Rights.
- Pressman, J. (2005). "A Brief History of the Arab-Israeli Conflict", *Arab-Israeli Conflict*, 1-15.

- Telegraph. (2011). *Timeline of the Gaza flotilla raid*. Dalam <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/8737182/Timeline-of-the-Gaza-flotilla-raid.html>. Diakses 16 Juni 2016.
- The Turkel Commission. (2010). *The Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010*. Tel Aviv: Government Printing Israel. Israeli Government.
- The World Jewish Congress. (2010). *Netanyahu defends Israel's raid on flotilla*. Dalam <https://www.worldjewishcongress.org/en/news/netanyahu-defends-israel-s-raid-on-flotilla?printable=true>. Diakses 20 September 2016.
- Time of Israel. (2015). *Gaza flotilla lawyers ask ICC to reconsider probe*. Dalam <http://www.timesofisrael.com/gaza-flotilla-lawyers-ask-icc-to-reconsider-probe/>. Diakses 16 Juni 2016.
- UN Secretary General's. (2011). *Report of the Secretary-General's Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident*. New York: United Nations.
- Verlo, Eric. (2010). *Israeli yacht club sends Anti-Freedom Flotilla to protest Gaza relief convoy*. Dalam <http://notmytribe.com/2010/Israeli-yacht-club-sends-anti-freedom-flotilla-to-protest-gaza-relief-convoy-817430.html>. Diakses 20 Oktober 2016.